KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI NEGARA-NEGARA ISLAM (Suatu Pendekatan *Welfare State*)

Akhmad Sobrun Jamil
Institut Pesantren K.H. Abdul Chalim Mojokerto
Email: Sm_syahadah@yahoo.com

ABSTRACT

Muslim countries have great and strategic potential in developing economic and financial resources. However, the great potential of Muslim countries is not followed by good economic performance so that it can prosper the people in Muslim countries. In the end, poverty and underdevelopment are identified with Muslim countries. Therefore this study aims to analyze the categories of Muslim countries related to their role in the welfare of society, where categories are classified into four groups, namely: weak countries, miserly countries, generous countries and prosperous countries. The country samples used in this study were 27 countries and the technical data analysis used descriptive statistical analysis. The results of this study indicate that the first, related to its role in the welfare of society, there are two countries included in the miser category, one country in the category of generous countries and twenty-five other countries in the category of weak countries.

Keywords: *Community Welfare, Role of the State.*

ABSTRAK

Negara-negara muslim memiliki potensi yang besar dan strategis dalam pengembangan sumber daya ekonomi dan financial. Namun, Potensi besar yang dimiliki negara-negara Muslim tidak diikuti dengan kinerja perekonomian yang baik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat di negara-negara muslim. Pada akhirnya, kemiskinan dan ketertinggalan di identikkan dengan negara-negara muslim. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kategori negara-negara muslim terkait perannya dalam mensejahterakan masyarakat, dimana kategori diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu: negara lemah, negara kikir, negara dermawan dan negara sejahtera. Sampel negara yang digunakan penelitian ini sebanyak 27 negara dan teknis analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pertama, terkait perannya dalam mensejahterakan masyarakat, terdapat dua negara yang masuk dalam kategori negara kikir, satu negara dalam kategori negara dermawan dan duapuluh lima negara lainnya dalam kategori negara lemah.

Kata Kunci: *Kesejahteraan Masyarakat, Peran Negara.*

PENDAHULUAN

Negara-negara yang berpenduduk muslim tersebar di berbagai wilayah, dan umumnya terkonsentrasi di Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa, Eurasia, Asia Selatan dan Timur, dan sub-Sahara Afrika. Kondisi penduduk di 48 negara dan 165 negara sedikitnya terdiri atas 50 persen muslim. Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki dunia Islam umumnya juga sangat potensial. Negara-negara muslim memiliki 70 persen

sumber energi di dunia dan 40 persen bahan baku ekspor. Dari 25 negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia yang kira-kira menguasai 96,5 persen cadangan minyak dunia, dimana 14 negara diantaranya juga negara Muslim dengan kontribusi 73,6 persen cadangan minyak dunia, yang masih ditambah lagi dengan cadangan gas alamnya yang mencapai 50,1 persen cadangan gas alam dunia (OPEC, 2005).

Dengan melihat pada sejumlah aspek yang paling fundamental dalam hidup dan kesempatan manusia, Human Development Index (HDI) memberikan suatu gambaran yang lebih lengkap mengenai pembangunan sebuah negara dibandingkan indikator-indikator lain.

Umumnya pemerintah negara-negara muslim yaitu negara dengan konstitusional Islam atau mayoritas penduduknya Islam di dunia ini memiliki orientasi untuk mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya ditunjukkannya melalui pengeluaran sosial pemerintah yang ditujukan untuk kesehatan dan pendidikan. Menurut World Bank pengeluaran sosial untuk kesejahteraan masyarakat negara-negara muslim masih rendah. Selain itu berdasarkan laporan Islamic Development Bank (IDB) ternyata neraca keuangan mayoritas negara-negara muslim dalam keadaan defisit.

Salah satu tantangan kebijakan publik adalah mewujudkan *welfare state* dan pemberantasan korupsi. Welfare state adalah sistem yang memberikan peran lebih besar kepada negara untuk mengalokasikan dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya (Spicker, 1995). Upaya untuk menyejahterakan masyarakat merupakan tanggungjawab utama pemerintah. Karena uang negara pada hakekatnya adalah uang rakyat yang diamanatkan. Namun, upaya untuk mensejahterakan masyarakat terhambat oleh praktek korupsi.

Negara-negara muslim dengan berbagai potensi yang dimilikinya, baik sumber daya alam (SDA), maupun sumber daya manusia (SDM), seharusnya mampu membangun kekuatan ekonominya untuk kebaikan dan kemashlahatan umat. Negara-negara muslim seyogyanya mampu mengembalikan prinsip dan misi Islam sesungguhnya, yakni memerangi kemiskinan. Karena, Islam menginginkan setiap individu untuk memperhatikan kesejahteraannya.

Islam mengakui kepentingan pribadi dan keinginan mendapatkan keuntungan. Kedua hal ini dapat membuat inisiatif, motivasi, efisiensi dan jiwa wirausaha. Namun,

jiwa rakus tidak akan pernah merasa cukup dan lupa akan hak dan kebutuhan orang lain yang pada sistem Kapitalis dan Sosialis dapat dihindari melalui mekanisme diri pribadi dengan tidak terlepas dari keyakinan dan tanggung jawab kepada Allah swt, nilai-nilai moral, persaudaraan sesama manusia dan keadilan sosial ekonomi. Tanggung jawab ini dapat menjadi daya motivasi yang kuat untuk menghindari individu dari hanya memenuhi kebutuhan pribadi tanpa melihat kebutuhan orang lain. Daya persaingan dan pasar memegang peran penting tetapi tidak cukup untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Kepentingan pribadi cenderung tidak dapat melihat segala cara dalam membatasi persaingan dan membatasi operasi terhadap kekuatan pasar, khususnya jika kekayaan dan kekuasaan tidak terbagi sama (Chapra, 2005).

Maka dalam konsep Islam, pembangunan kesejahteraan masyarakat memadukan antara aspek material dan spiritual, keduniawian dan keakhiratan. Berdasarkan problematika-problematika yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini merumuskan bagaimana kategori Negara-negara muslim dalam menyejahterakan masyarakat, apakah termasuk kategori negara lemah, negara kikir, negara dermawan atau negara sejahtera?

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menginginkan pengkayaan dengan statistik deskriptif untuk hal-hal tertentu yang diperlukan. Penelitian ini diawali dengan melakukan studi literatur yang mencakup kajian teori, dan model yang berkaitan dengan masalah, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan kumpulan objek penelitian yang memiliki kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Berdasarkan kualitas dan ciri-ciri tersebut, populasi dapat dipahami sebagai sekelompok unit analisis atau objek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), menurut laporan yang dikeluarkan

OKI, negara anggota OKI sekarang ini berjumlah 57 negara. Namun terdapat beberapa negara yang data-data keuangan negaranya tidak dipublikasikan secara internasional dan di sisi lain terdapat beberapa negara Muslim yang tidak diketahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, dengan keterbatasan tersebut, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2003). Sampel yang digunakan penelitian dengan ciri dan klasifikasi (1) negara dengan konstitusional Islam (2) mayoritas penduduknya Islam (3) data-data keuangan negaranya dipublikasikan secara internasional (4) negara pengamat OKI yang memiliki kontribusi penting dalam peta pemikiran ekonomi Islam.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka dari ke-57 negara muslim yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini menjadi 27 negara, yaitu: Indonesia, Lebanon, Malaysia, Maroko, Mesir, Pakistan, Arab Saudi, Senegal, Tunisia, Turki, Yordania, Suriah, Uni Emirat Arab, Sierra Leone, Bangladesh, Gabon, Gambia, Uganda, Benin, Albania, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan, Mozambik, Kazakhstan, Chad dan India.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder selama periode tahun 2006 s/d 2010. Adapun sumber data berupa buku-buku laporan tahunan beberapa terbitan seperti statistik keuangan negara-negara muslim dalam angka dan jurnal-jurnal beberapa terbitan diperoleh dari berbagai instansi yaitu :

- 1) World Bank
- 2) IMF
- 3) UNDP
- 4) IDB
- 5) Transparency International
- 6) Lembaga dan organisasi lain yang terkait dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka yang merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi yang masih relevan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam

penelitian ini diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dari berbagai sumber, diantaranya: World Bank, IMF, UNDP, IDB, Transparency International dalam bentuk data tahunan.

5. Teknik Analisis

Data-data yang diperlukan dalam analisis ini berupa :

- 1) Pengeluaran sosial pemerintah (PS) negara-negara muslim untuk kesehatan dan pendidikan.
- 2) Pertumbuhan ekonomi (GDP) negara-negara muslim.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kategorisasi negara-negara muslim terkait perannya dalam mensejahterakan masyarakat. Kategorisasi di dasarkan pendapat (Ranis dan Stewart, 1999), Haq (1995) dan Suharto (2006). Kategorisasi akan dibagi menjadi empat, yaitu:

- 1) Negara lemah, negara dalam kategori ini ditandai dengan GDP yang rendah dan PS yang rendah. GDP negara-negara ini masih di bawah US\$5.000 dan belanja sosial kurang dari 10 persen dari pengeluaran pemerintahnya.
- 2) Negara kikir, negara dalam kategori ini memiliki GDP yang tinggi, tetapi PS-nya relatif rendah. GDP negara-negara ini di atas US\$15.000. Namun negara-negara ini mengeluarkan belanja sosial kurang dari 15 persen dari pengeluaran pemerintahnya.
- 3) Negara dermawan, negara dalam kategori ini memiliki GDP yang relatif rendah, tetapi negara memberi porsi besar terhadap PS. GDP negara-negara ini antara US\$5.000 - US\$10.000. Negara-negara ini mengeluarkan belanja sosial sebesar 10 – 20 persen dari pengeluaran pemerintahnya.
- 4) Negara sejahtera, negara dalam kategori ini merupakan sosok negara ideal, karena memiliki GDP dan PS yang tinggi. GDP negara-negara ini di atas US\$15.000. Negara-negara ini juga mengeluarkan belanja sosial di atas dari 15 persen dari pengeluaran pemerintahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kriteria kategorisasi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diuraikan perbandingan GDP dan pengeluaran sosial beberapa negara muslim pada Tahun 2006 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perbandingan GDP dan Pengeluaran Sosial
Beberapa Negara Muslim Tahun 2006

No	Negara	GDP Perkapita (US\$)	Sosial Expenditure (%) Pengeluaran Pemerintah	Status Negara
1	Chad	604.81519	2,6	Lemah
2	Indonesia	1.585,6508	4,6	Lemah
3	Lebanon	5.476,1952	6,7	Lemah
4	Malaysia	5.890,3082	6,6	Lemah
5	Maroko	2.106,2043	7,2	Lemah
6	Mesir	1.422,34	6,6	Lemah
7	Pakistan	789.40856	3,4	Lemah
8	Arab Saudi	14.380,587	9	Kikir
9	Senegal	839,62916	8,1	Lemah
10	Tunisia	3394,3103	10,3	Dermawan
11	Turki	7687,1257	3,5	Lemah
12	Yordania	2825,6216	4,6	Lemah
13	Suriah	1767,295	7,2	Lemah
14	Uni Emirat Arab	47.634,331	2,9	Kikir
15	Sierra Leone	266,92559	1,5	Lemah
16	Bangladesh	434,84085	3,7	Lemah
17	Gabon	6832,2642	3,2	Lemah
18	Gambia	328,51763	3,4	Lemah
19	Uganda	339,70459	1,8	Lemah
20	Benin	601,50093	6,2	Lemah
21	Albania	2893,1579	2,5	Lemah
22	Kirgizstan	545,86177	8,7	Lemah
23	Tajikistan	433,77698	4,5	Lemah
24	Turkmenistan	2140,3427	1,5	Lemah
25	Mozambik	333,29315	8,5	Lemah
26	Kazakhstan	5.291,574	4,9	Lemah
27	India	857,2083286	4,1	Lemah

Sumber: UNDP Report

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kategori negara-negara muslim terkait perannya dalam mensejahterakan masyarakat pada tahun 2006, mayoritas masuk dalam kategori negara lemah, hal ini ditandai dengan GDP yang rendah dan PS yang rendah. Rata-rata GDP negara-negara ini masih di bawah US\$5.000 dan belanja sosial kurang dari 10 persen dari pengeluaran pemerintahnya. Namun, terdapat dua negara masuk dalam kategori negara kikir, karena memiliki GDP yang tinggi, tetapi PS-nya

relatif rendah. GDP negara-negara ini berada di sekitar US\$15.000, tetapi negara-negara ini mengeluarkan belanja sosial kurang dari 15 persen dari pengeluaran pemerintahnya. Negara kikir pada tahun 2006 yaitu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Selain itu, terdapat satu negara yang masuk dalam kategori negara dermawan yaitu Tunisia, karena negara ini memiliki GDP yang relatif rendah, tetapi negara memberi porsi besar terhadap PS. GDP negara ini kurang dari US\$5.000 tetapi mengeluarkan belanja sosial lebih dari 10 persen dari pengeluaran pemerintahnya.

Berdasarkan deskripsi kategori negara-negara muslim terkait perannya dalam mensejahterakan masyarakat yang telah dianalisis, maka kategori negara-negara muslim dapat dijelaskan secara sederhana melalui gambar matrik berikut:

<u>Negara Kikir:</u> Arab Saudi, Uni Emirat Arab	<u>Negara Sejahtera:</u> Tidak ada
<u>Negara Lemah:</u> Chad, Indonesia, Lebanon, Malaysia, Maroko, Mesir, Pakistan, Senegal, Turki, Yordania, Suriah, Sierra Leone, Bangladesh, Gabon, Gambia, Uganda, Benin, Albania, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan, Mozambik, Kazakhstan dan India.	<u>Negara Dermawan:</u> Tunisia

Gambar 1

Kategori Negara-negara Muslim berdasarkan GDP dan Pengeluaran Sosial (PS)

Berdasarkan gambar matrik di atas, diketahui kategori negara-negara muslim pada Tahun 2006 sebagai berikut:

1. Negara Sejahtera: tidak ada
2. Negara Kikir: Arab Saudi dan Uni Emirat Arab
3. Negara Dermawan: Tunisia
4. Negara Lemah: Indonesia, Lebanon, Malaysia, Maroko, Mesir, Pakistan, Senegal, Sudan, Tunisia, Turki, Yordania, Suriah, Sierra Leone, Bangladesh,

Gabon, Gambia, Uganda, Benin, Albania, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan, Mozambik, Kazakhstan, Chad dan India.

Untuk perbandingan GDP dan pengeluaran sosial beberapa negara muslim pada Tahun 2007, secara terinci dapat di lihat seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2. Perbandingan GDP dan Pengeluaran Sosial
Beberapa Negara Muslim Tahun 2007

No	Negara	GDP Perkapita (US\$)	Sosial Expenditure (%) Pengeluaran Pemerintah	Status Negara
1	Chad	676,47575	2,7	Lemah
2	Indonesia	1.859,3026	4,7	Lemah
3	Lebanon	6.059,853	6,5	Lemah
4	Malaysia	6.904,598	6,4	Lemah
5	Maroko	2.388,7939	1,7	Lemah
6	Mesir	1.695,8039	6,1	Lemah
7	Pakistan	870,62947	3,6	Lemah
8	Arab Saudi	15.091,299	9,1	Kikir
9	Senegal	987,76233	3,2	Lemah
10	Tunisia	3.807,6772	10,1	Dermawan
11	Turki	9.246,0304	3,4	Lemah
12	Yordania	3.137,6513	5,4	Lemah
13	Suriah	2.099,4588	6,5	Lemah
14	Uni Emirat Arab	47.756,56	2,8	kikir
15	Sierra Leone	303,69191	4,7	Lemah
16	Bangladesh	475,24965	3,7	Lemah
17	Gabon	8.127,6727	3	Lemah
18	Gambia	409,04377	2,6	Lemah
19	Uganda	392,75085	1,6	Lemah
20	Benin	683,65213	6	Lemah
21	Albania	3.377,2215	2,9	Lemah
22	Kirgizstan	726,40142	10	Lemah
23	Tajikistan	563,18253	4,5	Lemah
24	Turkmenistan	2.606,4158	1,4	Lemah
25	Mozambik	368,15805	3,5	Lemah
26	Kazakhstan	6.771,6469	5,3	Lemah
27	India	1.104,588	1,1	Lemah

Sumber: UNDP Report

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kategori negara-negara muslim terkait perannya dalam mensejahterakan masyarakat pada tahun 2007, mayoritas masih masuk dalam kategori negara lemah, hal ini ditandai dengan GDP yang rendah dan PS yang rendah. Rata-rata GDP negara-negara ini masih di bawah US\$5.000 dan belanja sosial kurang dari 10 persen dari pengeluaran pemerintahnya. Namun, terdapat dua negara masuk dalam kategori negara kikir, karena memiliki GDP yang tinggi, tetapi PS-nya relatif rendah. GDP negara-negara ini berada di sekitar US\$15.000, tetapi negara-negara ini mengeluarkan belanja sosial kurang dari 15 persen dari pengeluaran pemerintahnya. Negara kikir pada tahun 2006 yaitu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Selain itu, terdapat satu negara yang masuk dalam kategori negara dermawan yaitu Tunisia, karena negara ini memiliki GDP yang relatif rendah, tetapi negara memberi porsi besar terhadap PS. GDP negara ini kurang dari US\$5.000 tetapi mengeluarkan belanja sosial lebih dari 10 persen dari pengeluaran pemerintahnya.

Berdasarkan deskripsi kategori negara-negara muslim terkait perannya dalam mensejahterakan masyarakat yang telah dianalisis, maka kategori negara-negara muslim dapat dijelaskan secara sederhana melalui gambar matrik berikut:

<p>GDP ↑</p> <p><u>Negara Kikir:</u> Arab Saudi, Uni Emirat Arab</p>	<p><u>Negara Sejahtera:</u> Tidak ada</p>
<p><u>Negara Lemah:</u> Chad, Indonesia, Lebanon, Malaysia, Maroko, Mesir, Pakistan, Senegal, Turki, Yordania, Suriah, Sierra Leone, Bangladesh, Gabon, Gambia, Uganda, Benin, Albania, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan, Mozambik, Kazakhstan dan India.</p>	<p><u>Negara Dermawan:</u> Tunisia</p>

PS →

Gambar 2

Kategori Negara-negara Muslim berdasarkan GDP dan Pengeluaran Sosial (PS)

Tahun 2007

Berdasarkan gambar matrik di atas, diketahui kategori negara-negara muslim pada Tahun 2007 sebagai berikut:

1. Negara Sejahtera: tidak ada
2. Negara Kikir: Arab Saudi dan Uni Emirat Arab
3. Negara Dermawan: Tunisia
4. Negara Lemah: Indonesia, Lebanon, Malaysia, Maroko, Mesir, Pakistan, Senegal, Sudan, Tunisia, Turki, Yordania, Suriah, Sierra Leone, Bangladesh, Gabon, Gambia, Uganda, Benin, Albania, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan, Mozambik, Kazakhstan, Chad dan India.

Untuk perbandingan GDP dan pengeluaran sosial beberapa negara muslim pada Tahun 2008, secara terinci dapat dilihat seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3. Perbandingan GDP dan Pengeluaran Sosial
Beberapa Negara Muslim Tahun 2008

No	Negara	GDP Perkapita (US\$)	Sosial Expenditure (%) Pengeluaran Pemerintah	Status Negara
1	Chad	784,43116	-	-
2	Indonesia	2.171,7048	2,8	Lemah
3	Lebanon	7.218,6742	2	Lemah
4	Malaysia	8.099,1986	4,1	Lemah
5	Maroko	2.793,4477	5,6	Lemah
6	Mesir	2.078,7963	3,8	Lemah
7	Pakistan	978,79528	2,9	Lemah
8	Arab Saudi	18.202,75	5,6	Kikir
9	Senegal	1.120,7208	5,1	Lemah
10	Tunisia	4.345,0705	-	-
11	Turki	10.297,505	-	-
12	Yordania	3.922,0498	-	-
13	Suriah	2.677,5901	-	-
14	Uni Emirat Arab	50.727,21	1	Kikir

15	Sierra Leone	348,32204	3,1	Lemah
16	Bangladesh	546,84685	2,4	Lemah
17	Gabon	10.020,49	-	-
18	Gambia	502,6189	-	-
19	Uganda	460,78846	3,8	Lemah
20	Benin	799,75597	-	-
21	Albania	4.076,4021	-	-
22	Kirgizstan	973,86419	5,9	Lemah
23	Tajikistan	771,33691	3,5	Lemah
24	Turkmenistan	3.918,2537	-	-
25	Mozambik	442,90105	-	-
26	Kazakhstan	8.513,5626	-	-
27	India	1.066,693	-	-

Sumber: UNDP Report

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kategori negara-negara muslim terkait perannya dalam mensejahterakan masyarakat pada tahun 2008, mayoritas masuk dalam kategori negara lemah, hal ini ditandai dengan GDP yang rendah dan PS yang rendah. Rata-rata GDP negara-negara ini masih di bawah US\$5.000 dan belanja sosial kurang dari 10 persen dari pengeluaran pemerintahnya. Namun, terdapat dua negara masuk dalam kategori negara kikir, karena memiliki GDP yang tinggi, tetapi PS-nya relatif rendah. GDP negara-negara ini berada di sekitar US\$15.000, tetapi negara-negara ini mengeluarkan belanja sosial kurang dari 15 persen dari pengeluaran pemerintahnya. Negara kikir pada tahun 2008 yaitu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Sedangkan Tunisia yang tahun sebelumnya masuk dalam kategori negara dermawan, pada tahun 2008 ini tidak diketahui data pengeluaran sosial pemerintahnya. Sehingga pada tahun 2008 ini, Tunisia tidak bisa dilakukan kategorisasi.

Berdasarkan deskripsi kategori negara-negara muslim terkait perannya dalam mensejahterakan masyarakat yang telah dianalisis, maka kategori negara-negara muslim dapat dijelaskan secara sederhana melalui gambar matrik berikut:

Gambar 3.

Kategori Negara-negara Muslim berdasarkan GDP dan Pengeluaran Sosial (PS)
Tahun 2008

Berdasarkan gambar matrik di atas, diketahui kategori negara-negara muslim pada Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Negara Sejahtera: tidak ada
2. Negara Kikir: Arab Saudi dan Uni Emirat Arab
3. Negara Dermawan: tidak ada
4. Negara Lemah: Indonesia, Lebanon, Malaysia, Maroko, Mesir, Pakistan, Senegal, Sudan, Tunisia, Turki, Yordania, Suriah, Sierra Leone, Bangladesh, Gabon, Gambia, Uganda, Benin, Albania, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan, Mozambik, Kazakhstan, Chad dan India.

Untuk perbandingan GDP dan pengeluaran sosial beberapa negara muslim pada Tahun 2009, secara terinci dapat di lihat seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4. Perbandingan GDP dan Pengeluaran Sosial
Beberapa Negara Muslim Tahun 2009

No	Negara	GDP Perkapita (US\$)	Sosial Expenditure (%)	Status Negara
----	--------	----------------------------	---------------------------	------------------

			Pengeluaran Pemerintah	
1	Chad	625.30195	5,9	Lemah
2	Indonesia	2.271,7884	1,2	Lemah
3	Lebanon	8.321,3707	5,7	Lemah
4	Malaysia	6.902,1756	1,9	Lemah
5	Maroko	2.827,8186	1,7	Lemah
6	Mesir	2.370,7111	2,4	Lemah
7	Pakistan	949,11658	3,5	Lemah
8	Arab Saudi	13.900,631	2,7	Kikir
9	Senegal	1.056,4957	9	Lemah
10	Tunisia	4.168,9368	-	-
11	Turki	8.553,7415	3,4	Lemah
12	Yordania	4.242,1537	5,4	Lemah
13	Suriah	2.691,5977	1,6	Lemah
14	Uni Emirat Arab	38.959,812	3,1	Kikir
15	Sierra Leone	323,45325	5,7	Lemah
16	Bangladesh	607,76494	1,1	Lemah
17	Gabon	7.411,1839	3	Lemah
18	Gambia	436.1472	2,6	Lemah
19	Uganda	488,24592	4,8	Lemah
20	Benin	771,70877	2,5	Lemah
21	Albania	3.772,6047	2,9	Lemah
22	Kirgizstan	881,36003	3,5	Lemah
23	Tajikistan	733,87412	1,1	Lemah
24	Turkmenistan	3.745,3323	1,4	Lemah
25	Mozambik	428,19747	3,5	Lemah
26	Kazakhstan	7.240,5703	2,5	Lemah
27	India	1.192,078	1,1	Lemah

Sumber: UNDP Report

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kategori negara-negara muslim terkait perannya dalam mensejahterakan masyarakat pada tahun 2009, mayoritas masih masuk dalam kategori negara lemah, hal ini ditandai dengan GDP yang rendah dan PS yang rendah. Rata-rata GDP negara-negara ini masih di bawah US\$5.000 dan belanja sosial kurang dari 10 persen dari pengeluaran pemerintahnya. Namun, terdapat dua negara masuk dalam kategori negara pelit, karena memiliki GDP yang tinggi, tetapi PS-nya relatif rendah. GDP negara-negara ini berada di sekitar US\$15.000, tetapi negara-negara ini mengeluarkan belanja sosial kurang dari 15 persen dari pengeluaran

pemerintahnya. Negara pelit pada tahun 2009 yaitu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Untuk Tunisia pada tahun 2009 tidak bisa dilakukan kategorisasi, karena data pengeluaran sosial negara ini pada tahun 2009 tidak diketahui.

Berdasarkan deskripsi kategori negara-negara muslim terkait perannya dalam mensejahterakan masyarakat yang telah dianalisis, maka kategori negara-negara muslim dapat dijelaskan secara sederhana melalui gambar matrik berikut:

GDP	<u>Negara Kikir:</u> Arab Saudi, Uni Emirat Arab	<u>Negara Sejahtera:</u> Tidak ada
	<u>Negara Lemah:</u> Indonesia, Lebanon, Malaysia, Maroko, Mesir, Pakistan, Senegal, Sudan, Turki, Yordania, Suriah, Sierra Leone, Bangladesh, Gabon, Gambia, Uganda, Benin, Albania, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan, Mozambik, Kazakhstan, Chad dan India.	<u>Negara Dermawan:</u> Tidak ada

PS

Gambar 4.

Kategori Negara-negara Muslim berdasarkan GDP dan Pengeluaran Sosial (PS)
Tahun 2009

Berdasarkan gambar matrik di atas, diketahui kategori negara-negara muslim pada Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Negara Sejahtera: tidak ada
2. Negara Kikir: Arab Saudi dan Uni Emirat Arab
3. Negara Dermawan: tidak ada
4. Negara Lemah: Indonesia, Lebanon, Malaysia, Maroko, Mesir, Pakistan, Senegal, Sudan, Tunisia, Turki, Yordania, Suriah, Sierra Leone, Bangladesh, Gabon, Gambia, Uganda, Benin, Albania, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan, Mozambik, Kazakhstan, Chad dan India.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kesejahteraan masyarakat di negara-negara muslim dengan pendekatan welfare state, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari 27 negara-negara muslim yang diteliti terkait perannya dalam mensejahterakan masyarakat, terdapat dua negara yang masuk dalam kategori negara pelit, satu negara dalam kategori negara baik hati dan duapuluh lima negara lainnya dalam kategori negara lemah.

Bagi peneliti lain, yang ingin mengambil permasalahan sama yakni kesejahteraan masyarakat di negara-negara muslim, agar penelitian dilakukan dengan model kausalitas, agar diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di negara-negara muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2005. *Konsep dan Pokok bahasan dalam ilmu kesejahteraan sosial*. Jakarta: UI Press.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIE YKPN.
- Boediono. 1999. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE.
- Chapra, M. Umer. 2005. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj.) Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Costantini, Valeria and S. Monni, 2006. *Environment, Human Development and Economic Growth*. FEEM Working Paper No. 35, 2006. Milano: Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM).
- Depdiknas. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Esping, Gosta and Andersen. 1999. *Why We Need a New Welfare State*. New York: Oxford.

- Friedman, E., Johnson, S., Kaufman, D, and Zoido-Lobaton, P. 2000. *Dodging the grabbing hand: the determinants of unofficial activity in 69 countries*. Journal of Public Economics. 76, 459-493.
- Gidens, Anthony. 2003. *Beyond Left and Right: tarian Ideologis alternatif di atas Pusara Sosialisme dan Kapitalisme*. Yogyakarta: Penerbit Ircisod.
- Glasson, John. 1997. *An introduction to regional planning concepts, theory and practice*. Hutchinson: Melbourne.
- Husodo, Siswono Yudo. 2006. *Membangun Negara Kesejahteraan, makalah disampaikan pada seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare state dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE) dan Perkumpulan Prakarsa.
- Kahf, Monzer. 1999. *The Principle of Socioeconomics Justice in The Comtemporarry Fiqh of Zakah*. Iqtisad, Journal of Islamic Economics.
- Kahf, Monzer. 1989. *Islamic Economics and Its Methodology*, terj. Ghazali dan Syed Omar. Jakarta: Pelanduk Publications.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2007. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Karim Bisnis Konsulting.
- Mankiw, N.Gregory. 2000. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Matewally, H.M., 1996. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Terj. Husein Sawit. Jakarta: Bangkit Daya Insana.
- Muhammad, dkk. 2010. *Impact of Globalization on Human Development Index: Case Study of Pakistan*. European Journal of Social Sciences – Volume 13, Number 1 (2010).
- Muhammad, Sulaiman D. 2010. *Impact of Globalization on HDI (Human Development Index): Case Study of Pakistan*. European Journal of Social Sciences – Volume 13, Number 1 (2010).
- Mundle, Sudipto. 1998. *Adjustment and Distribution : The Indian Experience*. International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 3, No. 4, Juli 1998.

- Ott, K. 1998. *Economy policy and unofficial economy in transition: the case of Croatia*. Paper presented at the Bled Slovenia International conference, Institute of Public Finance, Bled Slovenia. Retrieved from www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/konference/10/05_ott.pdf
- Ranis, Gustav and Stewart, Frances. 2005. *Dynamic Links between the Economy and Human Development*. DESA Working Paper No. 8. Washington D.C.: World.
- Rao, Bhaskara. 1998. *Integrated production practices of cashew in India*. International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 1, No. 2, february 1998.
- Romer, 1994. *The Origins of Endogenous Growth*. Journal of Economic perspectives- volume 8, Number 1 Winter 1994.
- Sakti, Ali. 2003. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam; sebagai jawaban atas kekacauan ekonomi modern*. Jakarta: Aqsa Publishing,
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1986. *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*. Terj. Saifuddin, dkk. Jakarta: Penerbit LIPPM.
- Schneider, F. 2008. *Shadow economy*. In: C. K. Rowley and F. Schneider, (Eds). Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy. Ch. 28, pp. 511-32.
- Spicker, Paul. 1995. *Social Policy: Themes and Approaches*, London: Prentice Hall.
- Spicker, Paul. 2002. *Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths*, London: Catalyst.
- Suharto, Edi. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Suryana, 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Tanzi, Vito. 1998. *The Role of the State and Public Finance in the Next Generation*. OECD Journal on Budgeting Volume 8 – No. 2, 2008.
- Todaro, Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Triwibowo, Darmawan dan Bahagijo, Sugeng. 2007. *Mimpi Welfare state*. Jakarta:
Perkumpulan Prakarsa.

UNDP. 2005. *Human Development Report 2005*. New York: Oxford University Press.
_____. 2006. *Human Development Report 2006*. New York: Oxford University Press.
_____. 2007. *Human Development Report 2007*. New York: Oxford University Press.
_____. 2008. *Human Development Report 2008*. New York: Oxford University Press.
_____. 2009. *Human Development Report 2009*. New York: Oxford University Press.
_____. 2010. *Human Development Report 2010*. New York: Oxford University Press.
W. Utomo, Tri Widodo. 2000. *Sistem Politik indonesia (Sebuah Pengantar)*. Bandung:
STIA.

Williams, Fiona. 2000. *Welfare State*. Jakarta: Raja Grafindo.

Zakaria, Fareed. 2003. *Masa Depan Kebebasan: Penyimpangan Demokrasi di
Amerikan dan Negara Lain*. Jakarta: Ina Publikatama.

Situs Internet:

<http://www.isdb.org>

<http://www.undp.org>

<http://www.worldbank.org>

<http://www.oic.com>

<http://www.opec.org>

<http://www.internationaltransparency.org>